

ABSTRAK

ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN PB 1 DAN PAJAK PENGHASILAN DI KOTA ATAMBUA

Pembimbing I : Dr. Nitaniel Hendrik, M.Si
Pembimbing II : Herry A. Manubulu, S.Sos.,M.Si.,AK
Nama : Rena Samantha Bria
Nim : 21190024
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Tahun Penulisan : 2025

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu aspek penting dalam sistem perpajakan yang menentukan keberhasilan penerimaan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Di Kota Atambua, sektor usaha restoran menjadi salah satu objek pajak yang dikenakan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PB1) oleh pemerintah daerah dan Pajak Penghasilan (PPh) Final oleh pemerintah pusat. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan perbedaan pelaporan antara PB1 dan PPh Final, yang mengindikasikan adanya ketidakpatuhan oleh para pelaku usaha. Perbedaan tarif antara PB1 yang dikenakan sebesar 10% dan PPh Final sebesar 0,5% seringkali menjadi penyebab munculnya ketidaksinkronan pelaporan. Sebagian pelaku usaha cenderung melaporkan omzet yang lebih rendah untuk menghindari beban pajak yang lebih tinggi, yang berakibat pada perbedaan nilai pelaporan antara pajak daerah dan pajak pusat. Kondisi ini menjadi dasar penting dilakukannya penelitian terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Atambua dalam

memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelaku usaha restoran di Kota Atambua memenuhi kewajiban perpajakan, baik secara formal maupun material. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan lima objek penelitian yaitu Matahari Resto, WOkaya Resto, Sirkuit Resto, Rumah Makan Pondok Indah, dan Rumah Makan Beringin. Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur terhadap pemilik restoran dan didukung oleh dokumentasi foto serta rekaman. Teknik analisis data dilakukan dalam dua tahap yaitu analisis pendahuluan dan analisis lanjutan. Pada tahap pendahuluan, data disusun berdasarkan indikator empirik dari konsep kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pada tahap lanjutan, data dianalisis menggunakan teknik reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan bantuan alat analisis berupa coding kategori dan lembar matriks manual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan formal pelaku usaha restoran tergolong baik. Hal ini terlihat dari kepemilikan NPWP dan NPWPD yang aktif, pelaporan dan pembayaran pajak yang rutin, serta pemahaman dasar mereka terhadap kewajiban pajak. Namun, dalam aspek kepatuhan material, masih ditemukan beberapa kelemahan, seperti ketidaktepatan dalam pelaporan omzet, keterlambatan pembayaran, serta perbedaan cara perlakuan terhadap tarif PB1 yang tidak selalu dimasukkan ke dalam harga jual. Salah satu contoh ditemukan pada Rumah Makan Pondok Indah, di mana pemilik menyatakan bahwa ia hanya membayar PB1 sesuai kemampuan karena tidak menerapkan langsung tarif 10% pada harga makanan. Hal ini dilakukan demi menjaga pelanggan tetap dan menghindari penurunan penjualan. Temuan ini memperlihatkan bahwa ada konflik antara kepatuhan terhadap aturan perpajakan dan strategi bisnis pelaku usaha, yang berdampak pada pelaporan dan pembayaran pajak yang tidak sinkron. Penelitian ini memberikan kontribusi secara teoritis dalam memperkuat konsep kepatuhan wajib pajak yang tidak hanya ditentukan oleh keberadaan

aturan hukum, tetapi juga oleh persepsi, sikap, dan strategi dari wajib pajak itu sendiri. Sementara secara terapan, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi instansi perpajakan, baik daerah maupun pusat, dalam melakukan pembinaan dan sosialisasi yang lebih mendalam kepada wajib pajak. Edukasi mengenai kewajiban pajak, penyederhanaan sistem pelaporan, serta komunikasi dua arah yang lebih terbuka diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak, khususnya pada sektor usaha restoran di wilayah-wilayah seperti Kota Atambua. Sektor ini memiliki karakteristik usaha yang beragam, mulai dari restoran modern yang dikelola secara profesional hingga rumah makan tradisional yang bersifat keluarga. Masing-masing memiliki pendekatan yang berbeda dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konteks sosial, budaya, dan ekonomi pelaku usaha menjadi penting dalam merancang pendekatan kebijakan perpajakan yang lebih efektif. Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa kepatuhan tidak hanya dapat dibentuk melalui sanksi atau pengawasan, tetapi juga melalui pendekatan edukatif dan kolaboratif antara fiskus dan wajib pajak. Dengan memahami tantangan yang dihadapi pelaku usaha secara langsung, diharapkan pihak otoritas pajak dapat menciptakan sistem yang lebih adaptif, adil, dan mendorong partisipasi aktif dalam membangun kesadaran pajak di daerah. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengeksplorasi lebih dalam persoalan kepatuhan pajak di sektor UMKM maupun sektor lain yang belum tergali secara komprehensif.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak PB1, PPh Final, Restoran, Kota Atambua